

ABSTRAK

Mil Atul Arifah, 126103202147, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara, Program Studi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing : Dr. Dian Ferricha S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, Fiqh Siyasah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan gender yang terjadi di masyarakat diantaranya budaya patriarki, peminggiran atau pemiskinan, tingkatan antar gender, kekerasan, dan beban kerja ganda hal ini dikarenakan pola penafsiran dan pemikiran masyarakat yang masih minim akan pengertian gender. Permasalahan gender akan terus berkembang dan menjadi sebuah problematika berkepanjangan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini memicu keingintahuan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam terkait Implementasi Peraturan Daerah tersebut di lingkungan masyarakat Kabupaten Tulungagung berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah.

Beberapa rumusan masalah tentang strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung, yakni: 1) Bagaimana penerapan pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung?; 3) Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung terhadap strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah berdasarkan perspektif fiqh siyasah?. Adapun tujuan penelitian ini: 1) Meninjau strategi pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah sebagai dasar pemecahan masalah gender di Kabupaten Tulungagung; 2) Mengkaji sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung; 3) Meninjau peran pemerintah dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulungagung sesuai perspektif fiqh siyasah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris serta menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah kepercayaan, keteralihan, dan kepastian.

Hasil penelitian tentang penerapan strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal, dimana Dinas Keluarga Berencana Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) setiap tahun sudah melakukan Bina Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), faktor mutasi jabatan ditingkat internal OPD serta tidak ada transfer ilmu ditingkat internal pasca pelatihan menjadikan proses penguatan kelembagaan optimal Pengarusutamaan Gender (PUG) kembali ke nol, OPD sendiri belum bisa melakukan sosialisasi terkait PUG pada tingkat masyarakat. Kurangnya responsif gender dan anggaran desa menjadikan pembentukan program PUG belum optimal, sehingga tingkat pemahaman pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung masih rendah. Dalam hal ini sepenuhnya belum sesuai dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 2) Implementasi Peraturan Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, diwujudkan dengan DKBPPPA sebagai pelaksana pelatihan responsif gender pada OPD Kabupaten Tulungagung, pada indeks pembangunan daerah DKBPPPA melakukan pendampingan pembentukan Desa Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), pembangunan sumber daya manusia melalui Program Kerja (Pokja) PUG, dan pencegahan diskriminasi gender melalui website Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIPANDA) di Kabupaten Tulungagung; 3) Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman kebijakan pembangunan gender dituangkan dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah sesuai dengan Al -Qur'an surah An Nisa' ayat 59 yang artinya Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan), makna ulil amri disini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam pembuatan peraturan.

ABSTRACT

Mil Atul Arifah, 126103202147, Implementation of Tulungagung Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 on Gender Mainstreaming in Regional Development: A Fiqh Siyasah Perspective, Study Program of Constitutional Law, Sharia Study Program, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Supervisor: Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Keywords: Implementation, Tulungagung Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 on Gender Mainstreaming, Fiqh Siyasah.

This research is motivated by gender issues in society, including patriarchal culture, marginalization or impoverishment, gender disparities, violence, and the dual burden of work. These issues arise from a limited understanding of gender within the community. Gender problems will continue to evolve and become a prolonged issue. Therefore, the Tulungagung Regency government established Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Gender Mainstreaming in Development. The Gender Mainstreaming Strategy (PUG) is a concrete step to address these issues, prompting the researcher's curiosity to examine the implementation of this regulation in the Tulungagung community from the perspective of Fiqh Siyasah.

The research poses several questions regarding the gender mainstreaming strategy in Tulungagung, namely: 1) How is gender mainstreaming applied in the Tulungagung community?; 2) How is the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 on gender mainstreaming in regional development in Tulungagung?; 3) What is the role of the local government of Tulungagung in the gender mainstreaming strategy in regional development from the perspective of Fiqh Siyasah? The objectives of this research are: 1) To review the gender mainstreaming strategy in the Tulungagung community based on Regional Regulation Number 13 of 2019 as a foundation for addressing gender issues in Tulungagung; 2) To analyze the targets, scope, and direction of the regulation; 3) To assess the government's role in implementing the gender mainstreaming strategy in Tulungagung according to the perspective of Fiqh Siyasah.

The research employs a juridical-empirical approach with a qualitative methodology. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. Validity checks are based on credibility, transferability, and dependability.

The results of a study on the implementation of gender mainstreaming strategies in Tulungagung Regency indicate that: 1) The implementation of gender mainstreaming among the community in Tulungagung Regency has not yet been fully realized, as the Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Agency (DKBPPPA) conducts annual capacity-building programs for Regional Government Agencies (OPDs); factors such as internal OPD job rotations

and the lack of knowledge transfer within the agency following training reset the progress of institutional strengthening for Gender Mainstreaming (PUG) to zero; the OPD itself has not been able to conduct outreach regarding PUG at the community level. The lack of gender responsiveness and village budgets has resulted in the development of PUG programs not being optimal, leading to a low level of understanding of gender mainstreaming among the community in Tulungagung Regency. In this regard, it is not yet fully in line with the implementation of Tulungagung Regency Regulation No. 13 of 2019 on Gender Mainstreaming in Regional Development; 2) The implementation of Tulungagung Regency Regulation No. 13 of 2019 on Gender Mainstreaming in Regional Development is carried out by the DKBPPPA as the implementing agency for gender-responsive training for Tulungagung Regency OPDs; in the regional development index, the DKBPPPA provides assistance in establishing Women-Friendly and Child-Caring Villages (DRPPA), human resource development through the Gender Mainstreaming Working Group (Pokja), and the prevention of gender discrimination via the website The Information System for the Protection of Women and Children (SIPANDA) in Tulungagung Regency; 3) The Role of the Local Government in Implementing Tulungagung Regency Regulation No. 13 of 2019 on Gender Mainstreaming in Regional Development in Tulungagung Regency as a guideline for gender development policy is articulated from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah in accordance with the -Qur'an, Surah An-Nisa' verse 59, which means: "Obey Allah and obey the Messenger (Prophet Muhammad) and those in authority (ulil amri)." The meaning of "ulil amri" here aligns with the role of the local government as the regulatory authority in the implementation of regulations.

المخلص

ميل أتل عريفة ٢١٤٧.٣٢٠.١٢٦١، تنفيذ اللائحة الإقليمية لمقاطعة تولونغاونغ رقم ١٣ السنة ٢٠١٩ حول دمج الجندر في التنمية الإقليمية: منظور فقه السياسة، برنامج دراسة القانون الدستوري، برنامج دراسة الشريعة، كلية الشريعة والقانون، جامعة ولاية إسلامية سايد علي رحمت الله. تولونغاونغ، المشرف: د. ديان فيريتشا س.ه.م.ه.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، اللائحة الإقليمية لمقاطعة تولونغاونغ رقم ١٣ السنة ٢٠١٩ حول دمج الجندر، فقه السياسة

تستند هذه الدراسة إلى القضايا الجندرية في المجتمع، بما في ذلك الثقافة الأبوية، والتهميش أو الفقر والتفاوتات بين الجنسين، والعنف، والعبء المزدوج للعمل. تنشأ هذه القضايا من فهم محدود للجندر داخل المجتمع. ستستمر مشكلات الجندر في التطور لتصبح قضية طويلة الأمد. لذلك، قامت حكومة مقاطعة تولونغاونغ بوضع اللائحة الإقليمية رقم ١٣ العام ٢٠١٩ بشأن دمج الجندر في التنمية. تعتبر استراتيجية دمج الجندر فغ خطوة ملموسة لمعالجة هذه القضايا، مما أثار فضول الباحث لدراسة تنفيذ هذه اللائحة في مجتمع تولونغاونغ من منظور الفقه السياسي. فقه السياسة

تطرح الدراسة عدة أسئلة تتعلق باستراتيجية دمج الجندر في تولونغاونغ، وهي ١ كيف يتم تطبيق (دمج الجندر في مجتمع تولونغاونغ؟)؛ ٢ كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ١٣ العام ٢٠١٩ بشأن دمج الجندر في التنمية الإقليمية في تولونغاونغ؟؛ ٣ ما هو دور الحكومة المحلية في تولونغاونغ في استراتيجية دمج الجندر في التنمية الإقليمية من منظور الفقه السياسي؟ أهداف هذه الدراسة هي: مراجعة استراتيجية دمج الجندر في مجتمع تولونغاونغ استنادًا إلى اللائحة الإقليمية رقم ١٣ العام ٢٠١٩ كأساس لمعالجة قضايا الجندر في تولونغاونغ؛ ٢ تحليل الأهداف والنطاق والاتجاه لللائحة؛ ٣ تقييم دور الحكومة في تنفيذ استراتيجية دمج الجندر في تولونغاونغ وفقًا لمنظور الفقه السياسي.

تستخدم الدراسة نهجًا قانونيًا تجريبيًا مع منهجية نوعية. تشمل تقنيات جمع البيانات الملاحظة، والمقابلات المعمقة، والتوثيق. تتضمن تقنيات تحليل البيانات جمع البيانات، وتخفيض

البيانات، وعرض البيانات، ورسم الاستنتاجات والتحقق. تستند فحوصات الصلاحية إلى المصدقية، والقابلية للنقل، والاعتمادية.

أظهرت نتائج الدراسة حول تطبيق استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في مقاطعة تولونغونغ ما يلي: ١: (لا يزال تطبيق تعميم المنظور الجنساني في مجتمع مقاطعة تولونغونغ دون المستوى الأمثل حيث تقوم إدارة تنظيم الأسرة وتمكين المرأة وحماية الطفل (د ك ب ف ف ف ا) كل عام بتنظيم برامج تدريبية للهيئات الإدارية المحلية (ا ف د)، إن عامل التغيير الوظيفي على المستوى الداخلي للهيئات الإدارية المحلية، بالإضافة إلى عدم وجود نقل للمعرفة على المستوى الداخلي بعد التدريب يعيد عملية تعزيز المؤسسات لتعميم المنظور الجنساني (ف ا غ) إلى نقطة الصفر، كما أن الهيئات الإدارية المحلية نفسها لم تتمكن بعد من إجراء توعية بشأن تعميم المنظور الجنساني على مستوى المجتمع. إن الافتقار إلى الاستجابة للمنظور الجنساني وميزانية القرية يجعل تشكيل برنامج تعميم المنظور الجنساني غير مثالي، وبالتالي فإن مستوى فهم تعميم المنظور الجنساني لدى المجتمع في مقاطعة تولونغونغ لا يزال منخفضاً. في هذا الصدد، لم يتم بعد الامتثال الكامل لتطبيق اللائحة المحلية لمقاطعة تولونغونغ رقم ١٣ لعام ٢٠١٩ بشأن تعميم المنظور الجنساني في التنمية المحلية؛ ٢ (تنفيذ اللائحة المحلية لمقاطعة تولونغونغ رقم ١٣ لعام ٢٠١٩ بشأن تعميم المنظور الجنساني في التنمية المحلية، يتم تجسيده من خلال قيام د ك ب ف ف ف ا بتنفيذ التدريب المراعي للمنظور الجنساني في الأجهزة الإدارية لمقاطعة تولونغونغ، وفيما يتعلق بمؤشر التنمية المحلية، تقوم د ك ب ف ف ف ا بتقديم الدعم لتأسيس القرى الصديقة للمرأة والمهتمة بالأطفال (د ر ف ف ا)، وتنمية الموارد البشرية من خلال برنامج عمل ف ك ج (ف ا غ)، ومنع التمييز الجنساني عبر الموقع نظام معلومات حماية المرأة والطفل (س ف ن د) في مقاطعة تولونغونغ؛ ٣ (دور الحكومة الإلكتروني المحلية في تطبيق اللائحة المحلية لمقاطعة تولونغونغ رقم ١٣ لعام ٢٠١٩ بشأن تعميم المنظور الجنساني في التنمية المحلية لمقاطعة تولونغونغ كدليل لسياسات التنمية الجنسانية، والتي تم صياغتها من منظور الفقه السياسي الدستوري وفقاً للقرآن، سورة النساء، الآية ٥٩، التي تعني: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (النبي محمد (وأولي الأمر) أصحاب السلطة»)، ومعنى «أولي الأمر» هنا يتوافق مع دور الحكومة المحلية كجهة تنظيمية في تطبيق اللوائح.